

## ABSTRAK

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PELANGGARAN HUKUM  
DALAM PEMILU KEPALA DAERAH  
(Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2012).**

Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2012, berlangsung dua putaran dan pada setiap putaran terjadi kampanye hitam terhadap calon tertentu. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, Pasal 78 ayat 2 dan 3 menyebutkan kampanye hitam masuk dalam ranah pidana pemilihan umum. Kampanye dilarang menghina seseorang dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kampanye dilarang menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat. Ancaman pidana dan dendanya disebutkan dalam Pasal 115-117. Berdasarkan riset yang dilakukan Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) menunjukkan bahwa kampanye hitam atau black campaign pada Pemilu Kepala DKI Jakarta tahun 2012 sangat tinggi. Berdasarkan penelitian kasus tersebut, IMMC mencatat yang kampanye bernuansa black campaign sekitar 48%. Jumlah ini lebih tinggi dari isu-isu tentang kegiatan pasangan calon. Peneliti tesis ini menelusuri ratio legis kampanye hitam (black campaign) dalam Pemilu Kepala DKI Jakarta tahun 2012 dan akibat hukumnya. Dengan metode pendekatan kasus (case approach), dijelaskan ratio decidendi atau alasan-alasan di balik perbuatan pelanggaran hukum dalam Pemilu Kepala DKI Jakarta pada tahun 2012, dan ditemukan fakta bahwa semuanya kasus hanya diproses hingga penyelidikan, belum sampai pada tahap penyidikan, apalagi penuntutan dan persidangan. Berdasarkan keadaan tersebut, mengacu pada standar minimal penyelenggaraan Pemilu demokratis sesuai UU Pemilu yang berlaku dan yang ditetapkan oleh Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) penegakkan hukum Pemilu merupakan implementasi dari ketentuan yang belum dilaksanakan. Penegakkan hukum (law enforcement) untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam pidana pemilu Kepala DKI Jakarta tahun 2012. Hal ini mengurangi kualitas pelaksanaan demokrasi karena kurang dalam penegakan hukum

***Kata kunci: Pemilihan Umum Kepala Daerah, Kampanye Hitam, dan Penegakan hukum.***

**ABSTRACT**

**LAW ANALYSIS OF VIOLATION IN REGIONAL CHIEF ELECTION:  
(Black Campaign in Jakarta Governor Election Case Study Year 2012).**

*The Jakarta Governor Election in 2012 held in two rounds and in each round going black campaign candidates. Under Law No. 32 of 2004, Article 78, paragraph 2 and 3, black campaigns is classified in criminal elections. The campaign is prohibited **insulting someone** by ethnicity, religion, race and intergroup (SARA). **The campaign is prohibited inciting or provoking a political party, individual or community groups.** Black campaign sanctions and penalties specified in Articles 115-117. Based on research conducted by Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) shows that black campaign in Jakarta Election in 2012 was very high. Based on the case study, IMMC nuanced that black campaign is about 48%. **This thesis research is exploring about ratio legis of lack campaign in the General Election in Jakarta in 2012 and its legal consequences.** With case approach methode of research, described ratio decidendi or the reasons behind the act a violation of law in the election, and found that all cases only be processed up to the first level investigation, has not reached to prosecution and trial. Based on the situation, referring to the minimum standard of election democratic election law applies appropriate and established by the Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Election Law enforcement is the implementation of the provisions have not been implemented. Enforcement (law enforcement) to implement and apply the law and to take legal action against any violation or violations of the law committed by the subject of the law is not fully implemented in Jakaria governor election in 2012. This reduces the quality of democracy because of lack of law enforcement.*

**Keywords : Jakarta Governor Election, Black Campaign, and Law Enforcement**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PELANGGARAN HUKUM DALAM PEMILU KEPALA DAERAH: (Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2012)**, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa tesis ini takkan pernah selesai tanpa interaksi dengan berbagai pihak. Untuk itu hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses belajar mengajar sehingga penulisan tesis ini, *Alhamdulillah* dapat diselesaikan. Namun secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. H. Fasich, Apt.**, selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H. Msi.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H. M.H.**, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.
4. **Dr. Sukardi, S.H., M.H.**, selaku pembimbing dan anggota tim penguji tesis, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini.
5. **Radian Salman, S.H., LL.M.**, anggota tim penguji tesis, yang telah memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan penyusunan tesis ini.
6. **Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M.**,selaku penguji dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan



7. **Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.**, selaku penguji dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan
8. **Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang dengan segala tulus telah memberikan pengajaran ilmu dan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. **Seluruh Karyawan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga**, yang dengan tulus telah membantu segala hal berkaitan dengan administrasi perkuliahan selama masa studi.
10. **Rekan-rekan mahasiswa Angkatan V Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan moril dalam penyelesaian studi.
11. Kepada kedua Orang tuaku, Ayahanda **Hartono** dan Ibunda **Rita Sumpahti** yang telah dengan ikhlas dan penuh kasih sayang memberikan dorongan dan motivasi serta doa terbaik kepada penulis.
12. Secara khusus bagi Istriku tercinta dan tersayang penjaga hati serta teman hidupku **dr. Putri Pertamasari** beserta anak-anakku tercinta **Inan Shafaa Namiya** dan **Manggala Danabrata**

*Tak ada gading yang tak retak*, Penulis menyadari bahwa tesis ini bukanlah karya yang tidak memiliki kelemahan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini. Hanya kepada Allah SWT jualah penulis panjatkan doa semoga budi baik dan segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Insya Allah, Aamiin Ya Robbal 'alamiin.

Jakarta, Oktober 2015

Penulis,

**Condro Maharanto, S.H.**

DAFTAR UNDANG-UNDANG, PERATURAN

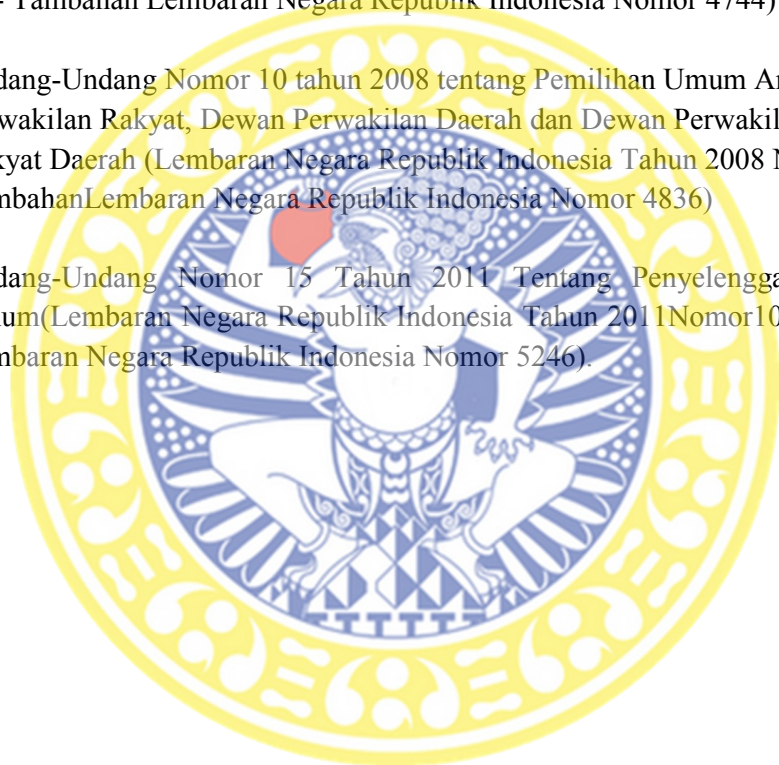
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan  
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  
93,- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51,-  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan  
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,- Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).



**DAFTAR KEPUTUSAN**

- Keputusan KPU DKI No.13/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pilgub DKI
- Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Syarat pencalonan gubernur dan wakil gubernur dari jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan perolehan suara sah dan perolehan kursi
- Keputusan KPU Propinsi DKI Jakarta Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
- Keputusan KPU Propinsi DKI Jakarta Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Ketentuan Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
- Keputusan nomor 27/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
- Keputusan nomor 27/Kpts/KPU-Prov-010/2012 yang menetapkan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dilaksanakan 2 (dua) putaran
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum.